

2019

ANALISIS INDIKATOR KEMISKINAN KABUPATEN NATUNA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA**

**ANALISIS INDIKATOR
KEMISKINAN
KABUPATEN NATUNA**

2019

Analisis Indikator Kemiskinan Kabupaten Natuna 2019

ISBN: 978-623-94884-4-4

No. Publikasi: 21030.2027

Katalog: 3205028.2103

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii + 55 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Natuna

Penyunting:

BPS Kabupaten Natuna

Desain Cover oleh:

BPS Kabupaten Natuna

Diterbitkan oleh:

© BPS Kabupaten Natuna

Dicetak oleh:

Percetakan Rizky Mandiri

Sumber Ilustrasi:

Freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN BUKU
Analisis Indikator Kemiskinan
Kabupaten Natuna 2019

Pengarah:

Ahmad Chaidir

Editor:

Ahmad Chaidir

Naskah:

Novianda Br Ginting

Gambar Kulit:

Novianda Br Ginting

KATA PENGANTAR

Publikasi Analisis Indikator Kemiskinan Kabupaten Natuna 2019 merupakan publikasi yang menyajikan metodologi, penghitungan dan analisis deskriptif yang terkait dengan angka kemiskinan Kabupaten Natuna.

Dengan terbitnya publikasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pengguna data serta pembuat kebijakan untuk melakukan evaluasi dan merencanakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Natuna, sekaligus menjawab segala kendala dan tantangan serta dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih yang tulus. Tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi ini dimasa yang akan datang.

Ranai, November 2020
Kepala BPS Kabupaten Natuna,



Ahmad Chaidir S.Si

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	v
Daftar isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Penulisan.....	5
1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II Metodologi	7
2.1 Konsep	9
2.2 Sumber Data	9
2.3 Metode Penghitungan Garis Kemiskinan	10
2.4 Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan.....	11
2.5 Indikator Kemiskinan	12
BAB III Kondisi Kemiskinan Kabupaten Natuna.....	13
3.1 Garis Kemiskinan	15
3.2 Penduduk Miskin	16
3.3 Tingkat Kemiskinan	17
3.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan	18
3.5 Indeks Keparahan Kemiskinan	20
3.6 Karakteristik Penduduk Miskin	21
3.6.1 Karakteristik Pendidikan	21
3.6.2 Karakteristik Ketenagakerjaan	25
3.6.3 Pengeluaran Per kapita Per Bulan.....	27

3.6.4 Karakteristik Perumahan.....	29
BAB IV Penutup.....	33
Catatan Teknis	37
Daftar Pustaka	43
Lampiran	47

<https://natunakab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Indikator Kemiskinan Kabupaten Natuna 2015-2019 ... 49
Tabel 2	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Natuna, 2015-2019 50
Tabel 3	Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Kabupaten Natuna, 2015-2019 51
Tabel 4	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja Kabupaten Natuna, 2015-2019 52
Tabel 5	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja Kabupaten Natuna, 2015-2019 53
Tabel 6	Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Untuk Komoditi Makanan menurut Status Kemiskinan Kabupaten Natuna, 2015-2019 54
Tabel 7	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama Kabupaten Natuna 2015-2019 55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Natuna, 2015-2019 (Rp/Kapita/Bulan) 15
Gambar 3.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Natuna, 2015-2019 (ribuan orang) 17
Gambar 3.3	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Natuna, 2015-2019 (persen) 18
Gambar 3.4	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Natuna, 2015-2019 19
Gambar 3.5	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Natuna, 2015-2019 20
Gambar 3.6	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Natuna, 2015-2019 22
Gambar 3.7	Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur Kabupaten Natuna, 2015-2019 23
Gambar 3.8	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur Kabupaten Natuna, 2015-2019 24
Gambar 3.9	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja Kabupaten Natuna, 2015-2019 25
Gambar 3.10	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja Kabupaten Natuna, 2015-2019 27
Gambar 3.11	Perkembangan Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Untuk Komoditi Makanan

	Menurut Status Kemiskinan Kabupaten Natuna, 2015-2019	28
Gambar 3.12	Perkembangan Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak Kabupaten Natuna, 2016-2019	29
Gambar 3.13	Perkembangan Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama Kabupaten Natuna, 2016-2019	31



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator pengukuran keberhasilan pembangunan. Menurunnya tingkat kemiskinan mencerminkan keberhasilan pembangunan, sebaliknya tingkat kemiskinan yang tinggi merupakan bentuk kegagalan.

Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. BPS pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi. Sejak tahun 2002, BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan sampai tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas Kor (kecuali tahun 2008), pada tahun 2011 – 2014 menggunakan data gabungan Susenas Modul Konsumsi Triwulan I, II, III dan IV dan pada tahun 2016-2019 menggunakan data Susenas Konsumsi Pengeluaran.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan publikasi Analisis Indikator Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2019 adalah:

- a. Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Natuna 2015-2019.
- b. Mengetahui karakteristik rumah tangga miskin Kabupaten Natuna 2015-2019.

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan Kabupaten Natuna tahun 2019. Karakteristik rumah tangga miskin disajikan pada tingkat kabupaten. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas Modul Konsumsi Pengeluaran Maret tahun 2019 dengan sampel sejumlah 510 rumah tangga.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II Metodologi, menjelaskan konsep, sumber data,

metode penghitungan garis kemiskinan, teknik penghitungan garis kemiskinan, indikator kemiskinan dan distribusi dan ketimpangan pendapatan..

Bab III Kondisi Kemiskinan Kabupaten Natuna, membahas tentang perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin.

Bab IV Penutup, merupakan penutup yang menggaris-bawahi hal-hal penting yang diharapkan mampu memberikan gambaran umum tingkat kemiskinan dan indikator kemiskinan lainnya.



BAB II

METODOLOGI

BAB II

Metodologi

2.1. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs method*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

2.2. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret 2019 dengan jumlah sampel 510 rumah tangga untuk Kabupaten Natuna. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non-makanan.

2.3. Metode Penghitungan Garis Kemiskinan

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) secara matematis:

$$GK = GKM + GKNM$$

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

2.4. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara. Garis kemiskinan sementara adalah Garis Kemiskinan periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum Indeks Harga Konsumen (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari

hasil SPKKD 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM).

2.5. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

1. *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) yaitu gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.



BAB III

KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN NATUNA

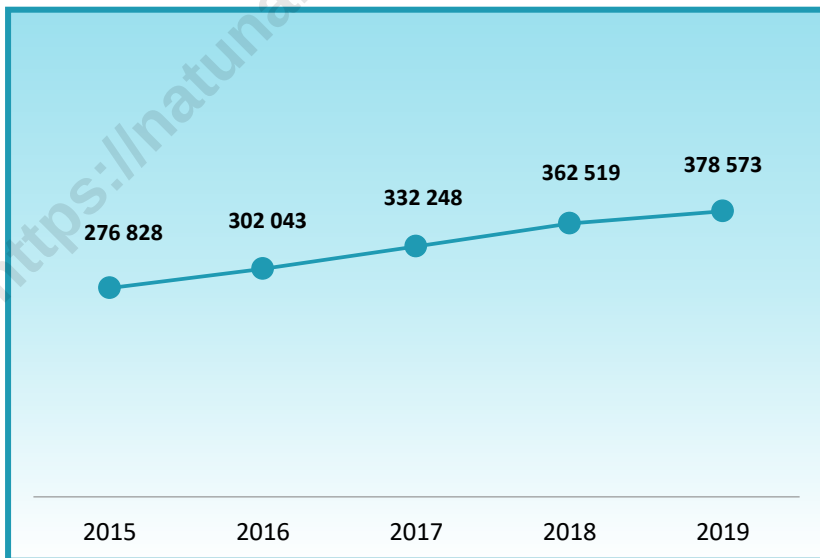
BAB III

Kondisi Kemiskinan Kabupaten Natuna

3.1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam analisis kemiskinan. Pada Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada periode 2015-2019 Garis Kemiskinan (GK) selalu mengalami peningkatan dan mencapai Rp378.573 per kapita per bulan pada 2019.

Gambar 3.1 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Natuna, 2015-2019 (Rp/Kapita/Bulan)



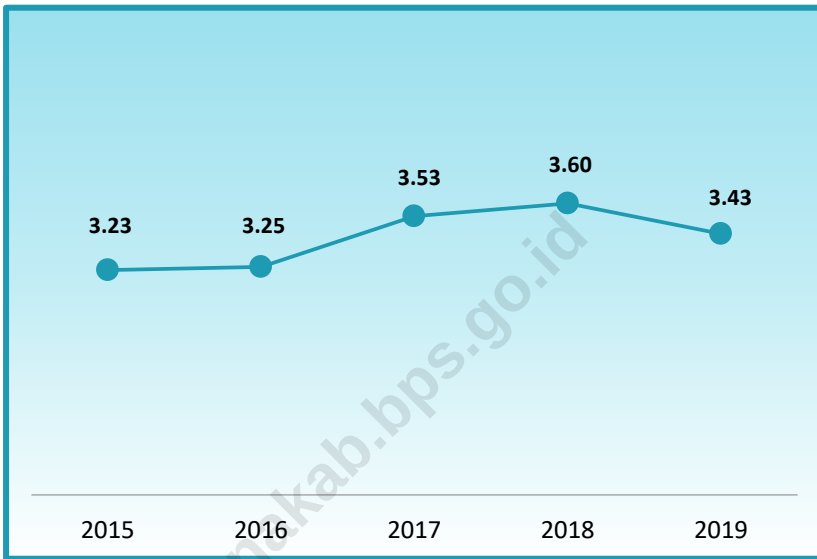
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Hal ini dapat diartikan bahwa apabila pada 2019 ada penduduk Kabupaten Natuna dengan pengeluaran dibawah Rp378.573 rupiah perbulan maka penduduk tersebut termasuk kategori penduduk miskin. Apabila dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 dimana Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp 362.519, terlihat adanya peningkatan Garis Kemiskinan (GK) sebesar 4,43 persen dalam setahun terakhir.

3.2. Penduduk Miskin

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa pada periode 2015–2019 terus terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Natuna akan tetapi dalam kurun waktu setahun terakhir yaitu pada 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dari hasil Susenas Maret 2019, penduduk miskin di Kabupaten Natuna sebanyak 3.429 orang. Jika dibandingkan dengan hasil Susenas Maret 2018, dimana jumlah penduduk miskin pada waktu itu 3.596 orang, kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Natuna sebanyak 167 orang atau turun 4,62 persen.

Gambar 3.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Natuna, 2015-2019 (ribuan orang)



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

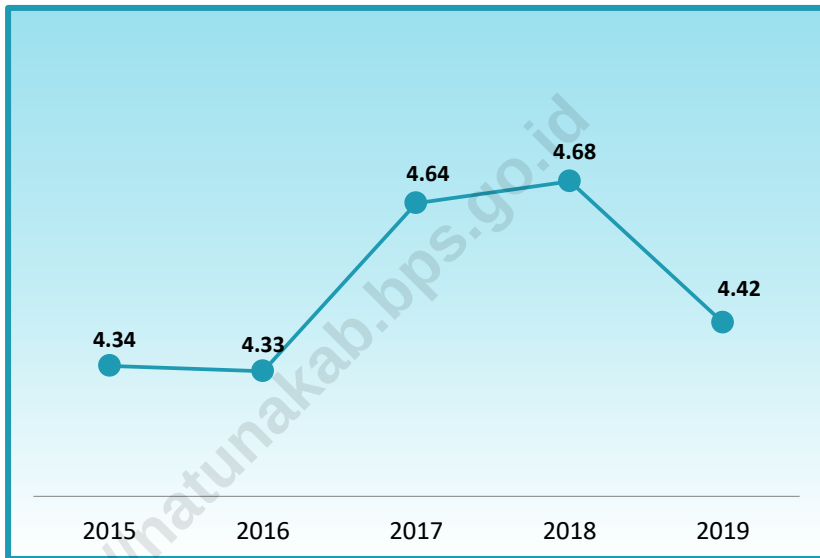
3.3. Tingkat Kemiskinan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Natuna cukup fluktuatif. Hal tersebut sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 3.3.

Selama periode 2015 sampai dengan 2019, persentase penduduk miskin di Kabupaten Natuna dari 4,34 persen menjadi 4,42 persen. Dalam periode tersebut, persentase

penduduk miskin tertinggi tercatat pada 2018 yang mencapai 4,68 persen.

Gambar 3.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Natuna, 2015-2019 (persen)



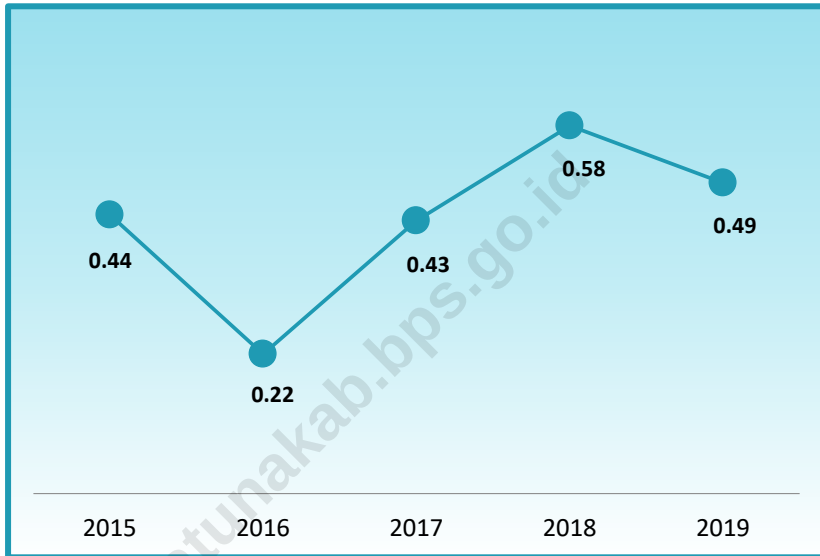
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

3.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus

bisa mengurangi tingkat kedalaman dari kemiskinan.

Gambar 3.4 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Natuna, 2015-2019



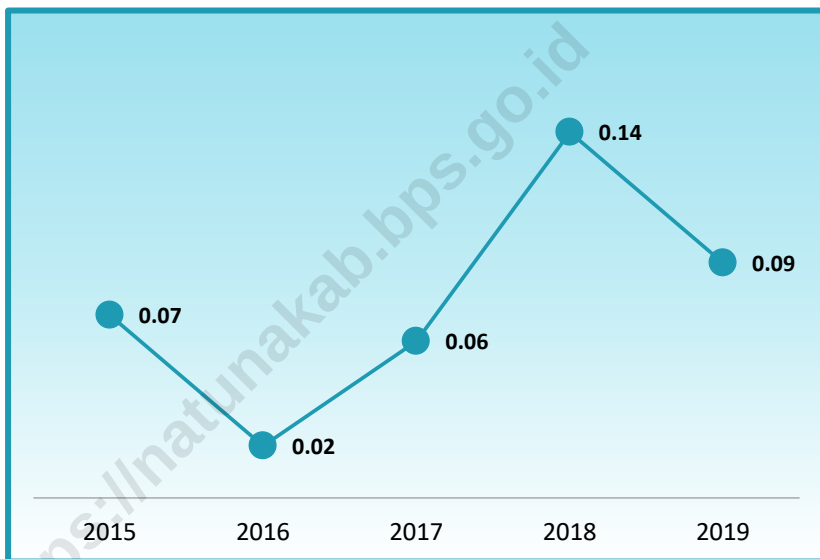
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir nilai indeks P1 menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif dari 0,44 pada 2015 menjadi 0,49 pada 2019. Indeks P1 Kabupaten Natuna 2019 mencapai 0,49 atau terjadi penurunan 0,09 poin dibandingkan dengan 2018. Semakin menurunnya P1 mencerminkan kondisi penduduk miskin yang semakin baik dalam hal tingkat kesenjangan rata-rata pengeluarannya terhadap garis kemiskinan dalam setahun terakhir.

3.5. Indeks Keparahan Kemiskinan

Selain indeks kedalaman kemiskinan, indikator lain yang perlu dilihat adalah indeks keparahan kemiskinan (P2).

Gambar 3.5 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Natuna, 2015-2019



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Sama seperti halnya dengan indeks P1, perkembangan indeks P2 juga cukup fluktuatif dari 0,07 persen pada 2015 menjadi 0,09 persen pada 2019. Indeks P2 Kabupaten Natuna 2019 mencapai 0,09 persen atau terjadi penurunan 0,05 persen poin dibandingkan dengan 2018. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kesenjangan pengeluaran diantara

penduduk miskin di Kabupaten Natuna dalam setahun terakhir.

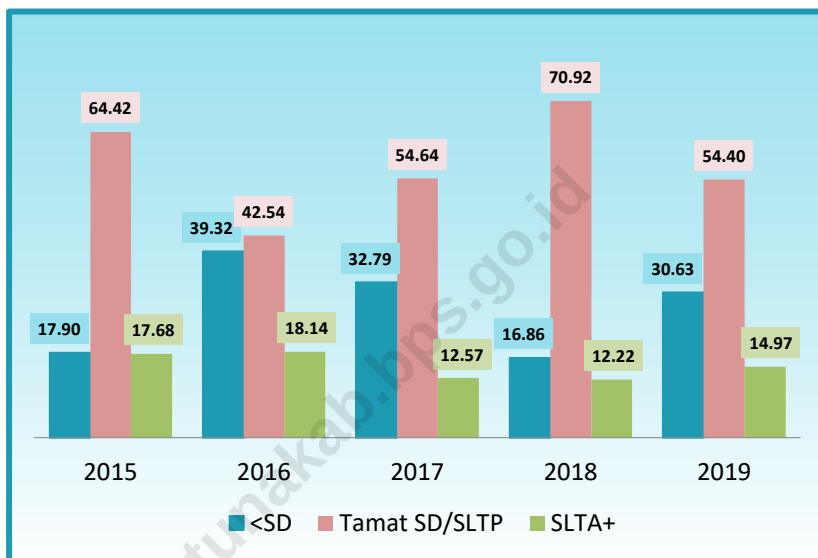
3.6. Karakteristik Penduduk Miskin

3.6.1. Karakteristik Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Pemerataan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan Negara. Pendidikan di Indonesia yang relatif mahal dan mayoritas penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan membuat pendidikan tidak merata dikalangan masyarakat miskin.

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kurang meratanya pendidikan. Dimulai dari program Wajib Belajar 9 Tahun, pemberian beasiswa-beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga bergulirnya Program Indonesia Pintar (PIP). Program-program tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan bagi semua warga negara dalam memperoleh pendidikan.

Gambar 3.6 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Natuna, 2015-2019

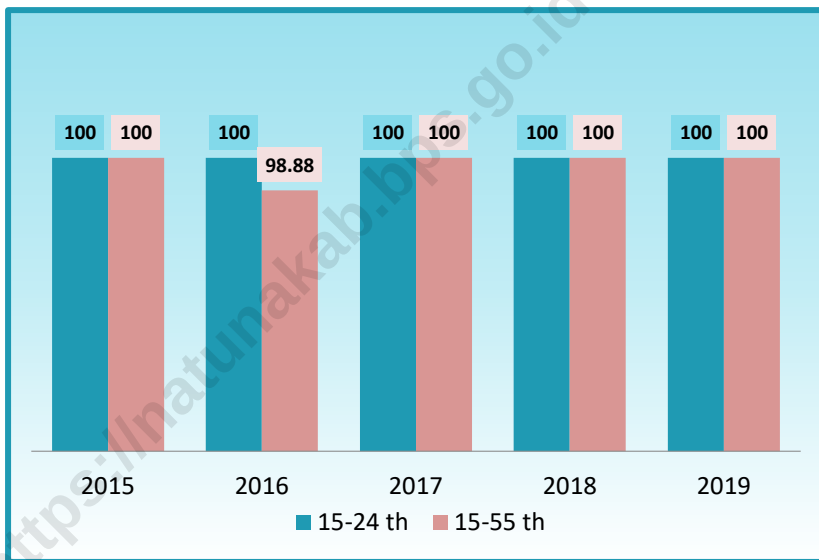


Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Tingkat pendidikan juga berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya akan mempunyai peluang yang lebih rendah untuk menjadi miskin. Pendidikan tertinggi sebagian besar penduduk miskin adalah tamat SD/SLTP. Pada 2015–2019, pendidikan tertinggi sebagian besar penduduk miskin Kabupaten Natuna usia 15 tahun ke atas adalah tamat SD/SLTP yaitu sebesar 64,42 persen pada tahun 2015 dan

54,40 persen pada tahun 2019. Sementara itu, persentase penduduk miskin dengan pendidikan tertinggi tamat SLTA ke atas mengalami penurunan dari 17,68 persen pada tahun 2015 menjadi 14,97 persen pada tahun 2019.

Gambar 3.7 Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur Kabupaten Natuna, 2015-2019

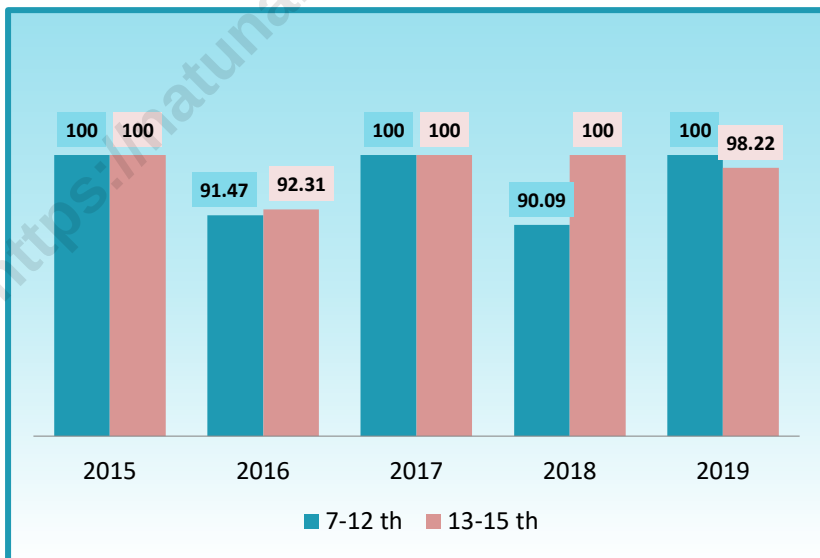


Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Angka melek huruf (AMH) penduduk miskin Kabupaten Natuna cenderung mengalami kenaikan. AMH penduduk miskin untuk kelompok usia 15-24 tahun sebesar 100 sejak 2015 sedangkan untuk kelompok usia 15-24 tahun sejak 2017.

Selain angka melek huruf, indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan adalah angka partisipasi sekolah (APS). Semakin besar angka partisipasi sekolah menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan. Sejak tahun 2015 angka partisipasi sekolah penduduk miskin Kabupaten Natuna usia 7–12 dan 13-15 tahun mengalami fluktuasi dan mencapai 100 pada 2019 untuk usia 7-12 tahun dan 98,22 untuk usia 13-15 tahun.

Gambar 3.8 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur Kabupaten Natuna, 2015-2019



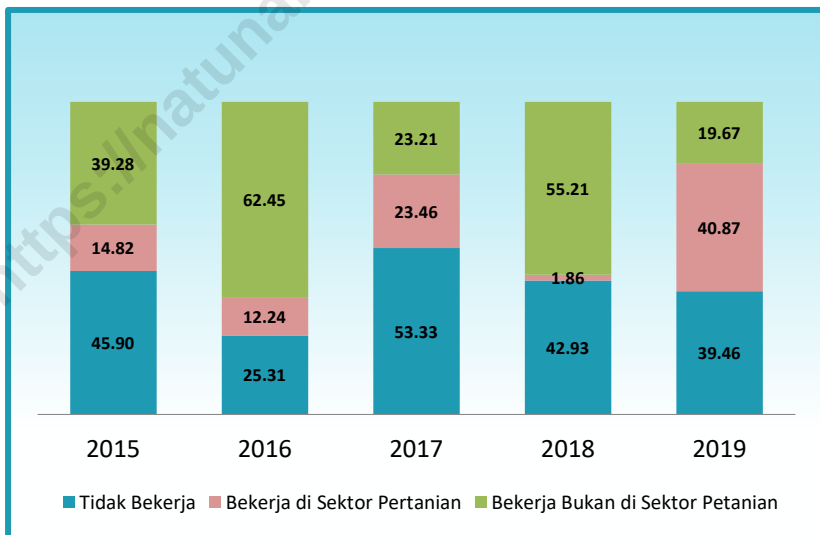
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

3.6.2. Karakteristik Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja diharapkan perekonomian rumah tangga akan lebih baik dibanding rumah tangga yang anggota rumah tangganya tidak ada yang bekerja.

Gambar 3.9 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke

Atas Menurut Sektor Bekerja Kabupaten Natuna, 2015-2019

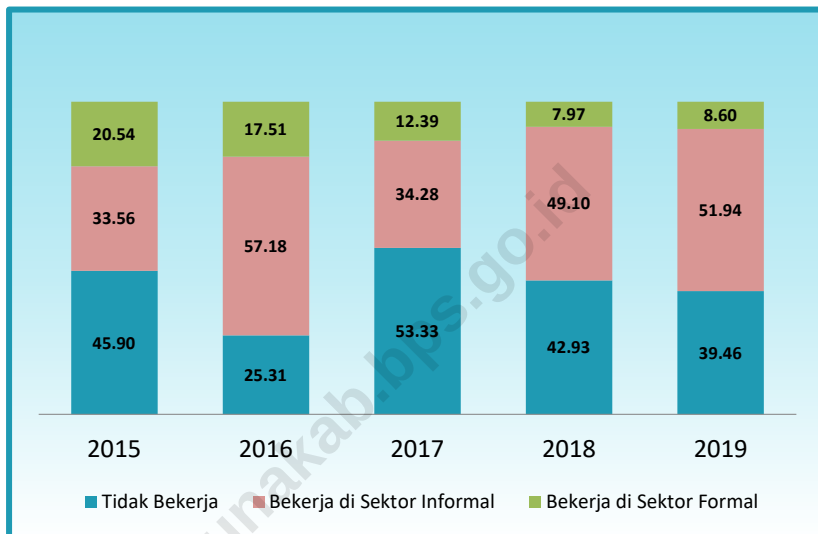


Selama 5 tahun terakhir, persentase penduduk miskin Kabupaten Natuna usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja (termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja) lebih dari 25 persen. Pada tahun 2019 tercatat sebesar 39,46 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja dan hanya 60,54 persen yang bekerja.

Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor sumber penghasilan utama rumah tangga dan status pekerjaan. Profil orang miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan. Meski ada kecenderungan penurunan persentase penduduk miskin 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, namun secara umum rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian (40,87 persen pada tahun 2019).

Berdasarkan status pekerjaan, penduduk miskin 15 tahun ke atas yang bekerja lebih banyak yang bekerja di sektor informal dibandingkan bekerja di sektor formal.

Gambar 3.10 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja, Kabupaten Natuna 2015-2019



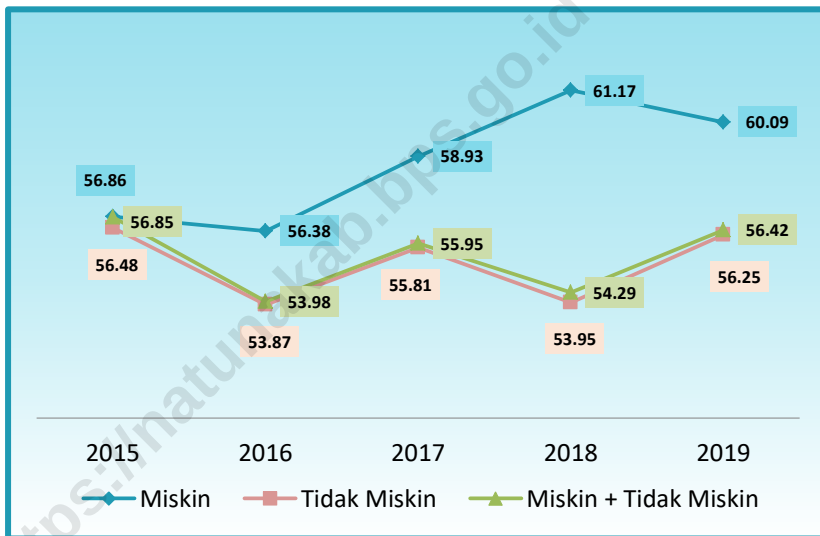
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

3.6.3. Pengeluaran per Kapita per Bulan

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga. Pengeluaran penduduk dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pengeluaran untuk membiayai komoditi makanan dan pengeluaran untuk membiayai komoditi bukan makanan (perumahan, sandang,

pendidikan, dan kesehatan). Sebagian besar pengeluaran per kapita per bulan pada rumah tangga miskin adalah untuk membiayai komoditi makanan (Gambar 3.11).

Gambar 3.11 Perkembangan Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Untuk Komoditi Makanan Menurut Status Kemiskinan Kabupaten Natuna, 2015-2019



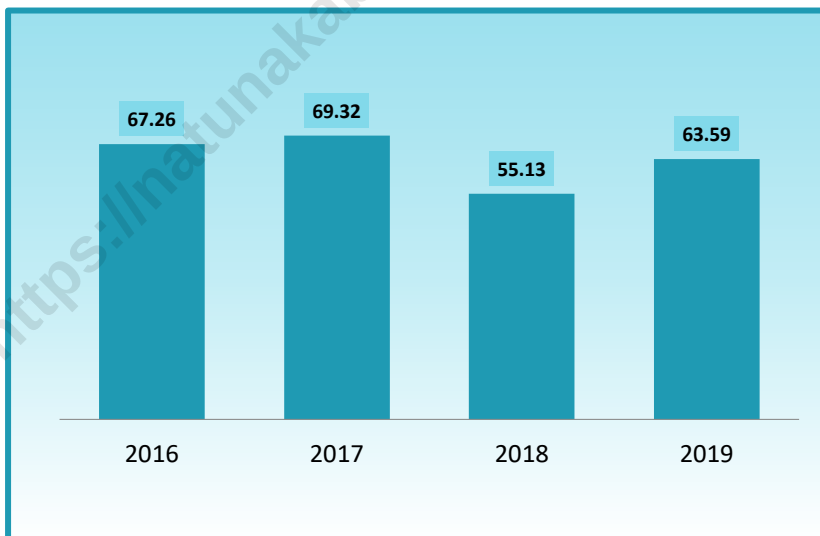
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Persentase pengeluaran per kapita per bulan untuk komoditi makanan cenderung naik pada periode 2015–2019 dan mencapai 60,09 persen pada 2019. Berdasarkan status miskin, persentase pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga miskin untuk komoditas makanan cenderung lebih besar dari yang tidak miskin.

3.6.4. Karakteristik Perumahan

Ketersediaan air layak sangat penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari air tidak sustain (air hujan), air terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi/cuci/dll yang digunakan berasal dari air terlindung.

Gambar 3.12 Perkembangan Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak Kabupaten Natuna, 2016-2019



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2019

Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak pada 2016 adalah 67,26 persen, meningkat menjadi

69,32 persen pada 2017, turun menjadi 55,13 persen pada 2018 dan kembali meningkat menjadi 63,59 persen pada 2019. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 36,41 persen rumah tangga miskin yang tidak menggunakan air layak di Kabupaten Natuna pada 2019.

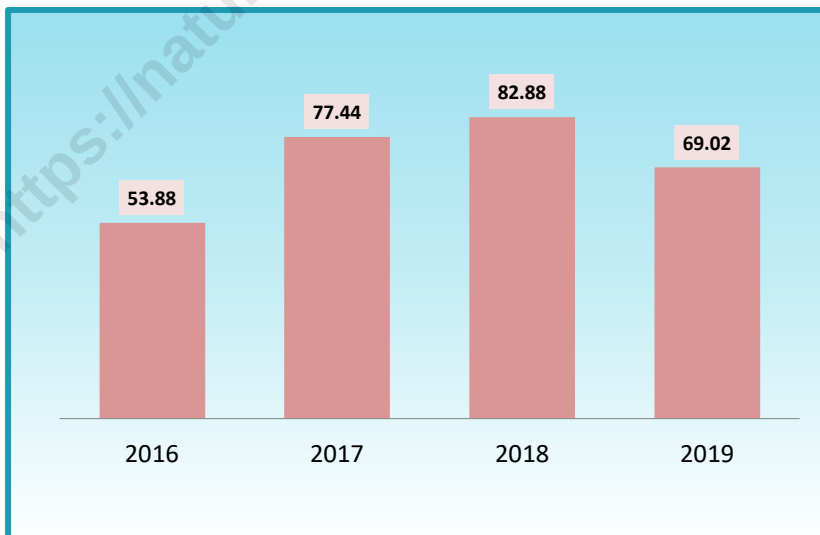
Masalah penyehatan lingkungan pemukiman khususnya pada pembuangan tinja merupakan salah satu dari berbagai masalah kesehatan yang perlu mendapatkan prioritas. Penyediaan sarana pembuangan tinja masyarakat terutama dalam pelaksanaannya tidaklah mudah, karena menyangkut peran serta masyarakat yang biasanya sangat erat kaitannya dengan perilaku, tingkat ekonomi, kebudayaan dan pendidikan. Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat.

Sampai saat ini, masih ada sebagian masyarakat Kabupaten Natuna yang memanfaatkan sungai untuk mandi, cuci dan jamban keluarga. Biasanya ini terjadi pada kelompok masyarakat yang tinggal dekat dengan sungai atau ketidakmampuan rumah tangga untuk membuat jamban sendiri.

Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat

pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama di Kabupaten Natuna pada 2016 adalah sebesar 53,88 persen, meningkat menjadi 88,28 pada 2018 dan menurun kembali menjadi 69,02 persen pada 2019. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 30,98 persen rumah tangga miskin yang tidak menggunakan jamban sendiri/bersama di Kabupaten Natuna pada 2019.

Gambar 3.13 Perkembangan Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama Kabupaten Natuna, 2016-2019



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2019



BAB IV PENUTUP

BAB IV

Penutup

- ❖ Pada periode 2018-2019, garis kemiskinan meningkat dari Rp 362.519,- menjadi Rp 378.573,- per kapita per bulan atau sebesar 4,43 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Natuna tahun 2019 sebesar 3,43 ribu orang (4,42 persen), turun dibanding tahun 2018 yang sebesar 3,60 ribu orang (4,68 persen).
- ❖ Profil rumah tangga miskin Kabupaten Natuna tahun 2019 memiliki keterkaitan erat dengan konsep kemiskinan secara konseptual, antara lain:
 - a. Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas sebagian besar adalah tamatan SD/SLTP yaitu sebesar 54,40 persen.
 - b. AMH penduduk miskin kelompok usia 15-24 tahun maupun kelompok usia 15-55 tahun adalah 100 persen
 - c. APS penduduk miskin kelompok usia 7-12 tahun adalah 100 persen, sementara pada kelompok usia 13-15 tahun adalah 98,22 persen.

- d. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja (termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja) sebesar 39,46 persen.
- e. Persentase pengeluaran penduduk miskin sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi makanan yaitu sebesar 60,09 persen.
- f. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak sebesar 63,59 persen.
- g. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama sebesar 69,02 persen.



CATATAN TEKNIS

Catatan Teknis

Pendidikan

- **Pendidikan yang ditamatkan** adalah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas. Publikasi ini mengelompokkan pendidikan yang ditamatkan menjadi tiga, yaitu SD ke bawah (tidak mempunyai ijazah), mempunyai ijazah SD atau SMP, dan mempunyai ijazah SMA atau ijazah perguruan tinggi.
- **Angka melek huruf** adalah proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi ini menyajikan angka melek huruf penduduk miskin untuk kelompok umur 15-24 tahun dan 15- 55 tahun.
- **Angka partisipasi sekolah** adalah proporsi dari penduduk miskin yang masih bersekolah. Publikasi ini menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sehingga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun diantara penduduk miskin berusia sekolah.

Ketenagakerjaan

- **Bekerja** adalah kegiatan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir.
- **Bekerja di sektor informal** adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar.
- **Bekerja di sektor formal** adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.
- **Bekerja di sektor pertanian** adalah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.
- **Bekerja di sektor bukan pertanian** adalah penduduk miskin yang bekerja selain di sektor pertanian, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik

dan gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi, keuangan, jasa atau lainnya.

- **Tidak bekerja** adalah penduduk miskin yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan).

Pengeluaran Per Kapita Untuk Makanan

- **Pengeluaran per kapita** adalah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.
- **Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan** adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dibagi dengan total pengeluaran per kapita (makanan + non makanan).

Fasilitas Perumahan

- **Rumah tangga pengguna air layak** adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari air tidak sustain (air hujan), air terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi/cuci/dll yang digunakan berasal dari air terlindung.

- **Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama** adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2016. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2015*. Jakarta:

Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016*. Jakarta:

Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017*, Jakarta:

BPS.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018*. Jakarta:

Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019*. Jakarta:

Badan Pusat Statistik.



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Tabel 1. Indikator Kemiskinan Kabupaten Natuna 2015-2019

Indikator Kemiskinan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk Miskin (000)	3,23	3,25	3,53	3,60	3,43
Persentase Penduduk Miskin (%)	4,34	4,33	4,64	4,68	4,42
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,44	0,22	0,43	0,58	0,49
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,07	0,02	0,06	0,14	0,09
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	276 828	302 043	332 248	362 519	378 573

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Natuna, 2015-2019

Pendidikan yang Ditamatkan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
< SD	17.90	39.32	32.79	16.86	30.63
Tamat SD/SLTP	64.42	42.54	54.64	70.92	54.40
SLTA+	17.68	18.14	12.57	12.22	14.97

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Tabel 3. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Kabupaten Natuna, 2015-2019

Tahun	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
	15-55 th	15-55 th	13-15 th	13-15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	100	100	100	100
2016	100	98.88	91.47	92.31
2017	100	100	100	100
2018	100	100	90.09	100
2019	100	100	100	98.22

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja Kabupaten Natuna, 2015-2019

Tahun	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja bukan di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	45.90	14.82	39.28
2016	25.31	12.24	62.45
2017	53.33	23.46	23.21
2018	42.93	1.86	55.21
2019	39.46	40.87	19.67

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Tabel 5. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja Kabupaten Natuna, 2015-2019

Tahun	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja bukan di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	45.90	33.56	20.54
2016	25.31	57.18	17.51
2017	53.33	34.28	12.39
2018	42.93	49.10	7.97
2019	39.46	51.94	8.60

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Tabel 6. Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Untuk Komoditi Makanan menurut Status Kemiskinan Kabupaten Natuna, 2015-2019

Tahun	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	56.86	56.48	56.85
2016	56.38	53.87	53.98
2017	58.93	55.81	55.95
2018	61.17	53.95	54.29
2019	60.09	56.25	56.42

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama Kabupaten Natuna, 2015-2019

Tahun	Air Layak	Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)
2016	67.26	53.88
2017	69.32	77.44
2018	55.13	82.88
2019	63.59	69.02

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA**

Jl. HR. Soebrantas, Sual RT 001/RW 005
Ranai, unguran Timur, Natuna, 29783
Homepage: <http://natunakab.bps.go.id>
Email: bps2103@bps.go.id

ISBN 978-623-94884-4-4



9 786239 488444